**ANALISA MENGENAI PERAN TATA USAHA NEGARA DALAM
MENEGAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE**

**Shalima Nayla Rizkia¹, Nur Laila Permasari², Muhamad Rizki Ramadhan³, Syauqi Al
Gifari Akmal⁴, Isman Mustaq⁵
Universitas Pakuan**

Email: shalimanayla4@gmail.com¹, nurlaillapermasari@gmail.com²,
rizkyramadhanm2004@gmail.com³, taugieakmal10@gmail.com⁴,
ismanmustaq05@gmail.com⁵

Abstrak

Tata Usaha Negara atau yang disingkat TUN merupakan kegiatan dalam suatu pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan didalam negara atau pejabat negara untuk menyelenggarakan urusan-urusan dalam pemerintahan berdasarkan dengan hukum. Prinsip Good Governance memiliki tujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, transparan serta memiliki keadilan didalamnya. Apa saja peran dari pejabat-pejabat di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip Good Governance dan apa saja yang sudah diterapkan saat ini di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan didalam jurnal ini yaitu penelitian secara kuantitatif yang dimana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber dari Internet dan sumber lainnya.

Kata Kunci: Tata Usaha Negara, Pejabat Negara, Good Governance.

Abstract

State Administration or what is abbreviated as TUN is an activity in a government carried out by bodies within the state or state officials to carry out government affairs in accordance with the law. The principle of Good Governance has the aim of creating a good environment, an environment that is clean, transparent and has justice in it. What are the roles of officials in Indonesia who have an obligation to implement the principles of Good Governance and what is currently being implemented in Indonesia. The research method used in this journal is quantitative research, where this research was carried out by collecting sources from the Internet and other sources.

Keywords: State Administration, State Official, Good Governance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh pada hukum yang berlaku. Didalam berjalannya suatu negara, tentunya baik masyarakat ataupun pemerintah sangat menginginkan jalannya pemerintahan di Indonesia ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Didalam suatu negara, tentunya terdapat suatu badan peradilan yaitu Peradilan Tata Usaha Negara atau yang disingkat TUN yang memiliki tugas untuk menjadi salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk masyarakat yang menginginkan keadilan mengenai sengketa didalam tata usaha negara. Keberadaan dari tata usaha negara yaitu untuk menciptakan suatu keserasian dan keseimbangan diantara hak-hak yang dipegang oleh masyarakat diantara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Tata Usaha Negara di Indonesia memiliki fungsi untuk melindungi kepastian hukum, keadilan hukum, serta keamanan dari hukum itu sendiri. Fungsi lainnya antara tata usaha negara dengan masyarakat yaitu tugas tata usaha negara untuk mengayomi masyarakat. Terdapatnya perlindungan hukum atau pemenuhan hak masyarakat merupakan cara untuk Tata Usaha Negara dalam memajukan, melengkapi serta mengatur perangkat di bidang ketatanegaraan sehingga dapat digunakan atau dijalankan secara efisien, bersih dan juga efektif. Selain daripada itu juga, ditegaskannya Tata Usaha Negara dapat dilakukan guna untuk menjalankan fungsi serta tugas yang sesuai dengan aturan-aturan di Indonesia. Peraturan yang didalam nya mengatur mengenai Administrasi Negara tepatnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya kebijakan yang diresmikan oleh pejabat tata usaha negara. Pada UU ini juga disebutkan sebagai dasar dari hukum penyelenggaraan pemerintahan terhadap upaya dalam menciptakan pemerintahan yang dijalankan dengan baik atau Good Governance guna mengupayakan dalam pencegahan tindakan korupsi, kolusi serta nepotisme di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang ini nantinya dapat menciptakan birokrasi yang lebih baik lagi, prinsip transparansi yang baik serta tingkat efisiensi yang tinggi.

Pengaturan terhadap jalannya suatu administrasi pemerintahan pada hakikatnya memiliki tujuan guna membangun prinsip-prinsip utama atau dasar, pola berfikir, perilaku, kebudayaan didalamnya serta bentuk administrasi yang demokratis, obyektif serta profesional guna menciptakan suatu keadilan serta kepastian dalam hukum di masyarakat. Undang-Undang ini merupakan segala upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. UU tersebut dapat menjadi instrument yang berguna untuk memberikan dampak baik dalam segi kualitas dari pelayanan pemerintahan untuk masyarakat supaya UU di Indonesia dapat terwujudkan disertakan dengan pemerintahan yang baik. Upaya dalam menciptakan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari prinsip atau konsep yang digunakan yaitu konsep Good Governance yang dimana konsep ini memiliki suatu acuan kepada proses untuk mendapatkan suatu pencapaian dari suatu keputusan dan didalam penerapan didalamnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Governance juga dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Good Governance memiliki peran dalam membantu mengintegrasikan antara peran pemerintah, sektor privat serta dalam masyarakat terutama untuk mencapai consensus bersama yang dimana didalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan serta bersifat efektif dan juga efisien.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yang dimana metode ini menggunakan sumber internet sebagai sumber dari penelitian. Data-data yang kami butuhkan kami pilah melalui teknologi informasi dari berbagai macam sumber-sumber data dan dari berbagai macam waktu. Peneliti melakukan kajian terhadap olahan data penelitian

berupa tesis, blog dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini melalui teknologi informasi internet.

Didalam penelitian ini, data primer menjadi data yang kami peroleh langsung dari objek yang kami jadikan penelitian. Data-data tersebut kami peroleh melalui tesis, jurnal ataupun blog yang menjadi kajian utama terhadap penelitian yang kami susun. Metode analisis data yang menggunakan penyajian data dengan tujuan agar data yang diperoleh dari peneliti dapat disajikan dalam bentuk narasi, uraian ataupun alur agar terorganisir dan tersusun sehingga dapat dipahami secara mudah. Kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses penyempurnaan analisis data sehingga menghasilkan keseluruhan laporan secara aktual dan tentunya secara lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peranan penting sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu maupun masyarakat secara luas. Penyelenggaraan administrasi negara yang efektif harus berlandaskan pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu menciptakan efisiensi sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam suatu negara kerap kali muncul, dan untuk menanganinya, prinsip-prinsip Good Governance dapat dijadikan acuan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan dalam menata ulang sistem pemerintahan agar lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Didalam penerapannya, efektifitas dan juga efisiensi dikedepankan untuk mempertahankan nilai-nilai didalam jalannya suatu pemerintahan serta memberikan cara kerja atau metode-metode yang dapat digunakan didalam suatu pemerintahan. Governance juga dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Paradigma Good Governance mengandung prinsip penting, yaitu akuntabilitas, yang menuntut agar setiap tindakan pejabat tata usaha negara dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menjadi ciri khas negara hukum dan demokrasi, yang mengharuskan semua tindakan pejabat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pejabat tata usaha negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, guna mewujudkan good governance.

KESIMPULAN

Good governance dalam konteks Tata Usaha Negara merujuk kepada penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berkualitas, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada kepentingan semua orang. Prinsip-prinsip pada Good Governance seperti kepastian hukum, keterbukaan dan juga akuntabilitas wajib diterapkan didalam penerbitan dan pelaksanaan suatu keputusan tata usaha negara atau yang disingkat KTUN. Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki landasan hukum guna untuk mewujudkan Good Governance didalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan lebih efisien dan kepastian hukum yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan BPK. Administrasi Pemerintahan “Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2014” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014> diakses 12 April 2025.
- Liestianingsih Hidayah, Ayu. 2023. Kementerian Keuangan “5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html#:~:text=Adapun%20salah%20satu%20kebijakan%20di,responsibilitas%2C%20independen%2C%20dan%20fairness.> diakses 12 April 2025.

- Aju Putrijanti, Kewenangan dan Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *MMH* 4 (Oktober 2015), hal. 426.
- Setiadi, Wicipto. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan". Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 93.
- Ahmad Fauzi. 2023. "Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)". *Binamulia Hukum*, 9(2), 171–182. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.371>.
- Kartika Widya Utama. 2024. "Eksistensi Good Governance Principle Sebagai Pedoman Kebijakan Administrasi Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1, April 2024.